

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. “Minimnya pengetahuan guru regular tentang pendidikan inklusif dan pemahaman terhadap penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), kurangnya sosialisai, tentang pendidikan inklusif, tidak adanya tenaga psikolog atau Bimbingan Konseling (BK) merupakan permasalahan yang menghambat belum berhasilnya pendidikan inklusif pada lembaga penyelenggara pendidikan inklusif”.²

Berkaitan dengan hal tersebut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memperkirakan ada sekitar 2,4 juta penyandang autisme di tanah air. Perkiraan jumlah tersebut diikuti perkiraan penambahan penyandang baru yaitu sebanyak 500 orang per tahun. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan data yang lebih rendah, yaitu jumlah anak berkebutuhan khusus ada 1,6 juta orang. Dari jumlah anak berkebutuhan khusus ini, diperkirakan hampir 80 persen di antaranya belum mendapatkan pendidikan yang layak. Kondisi ini kian parah sejak merebaknya COVID-19, anak-anak penyandang autisme di Indonesia kesulitan mendapatkan hak-hak pendidikan di sekolah formal yang mengakomodasi kebutuhan khusus mereka. Akses pendidikan bagi mereka makin

2 S Grindle, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF Zaini Sudarto Prodi Pendidikan Luar Biasa FIP Unesa Abstrak” (2011).

sulit saat memasuki masa pandemi karena mayoritas sekolah melaksanakan pembelajaran daring yang tanpa interaksi³

Masalah lain terkait dengan sinkronisasi data antar lembaga terkait penyandang disabilitas masih berbeda-beda sehingga sulit untuk dijadikan rujukan. Kemudian temuan terkait dengan peran dan fungsi GPK, banyak sekolah penyelenggara pendidikan inklusif masih belum memahami dengan baik.

Demikian pula halnya dengan aksesibilitas baik secara fisik maupun non fisik, Belum terpenuhinya aksesibilitas dalam memberikan kenyamanan dan ramah bagi semua anak, fenomena lain adalah sikap orang yang merasa malu lantaran anaknya memiliki hambatan dan kekurangan menjadi salah satu faktor keengganan untuk menyekolahkan ke Sekolah Luar Biasa (SLB). Selain itu, keberlanjutan pembinaan dari sekolah penyelenggara pendidikan inklusif kepada sekolah-sekolah rintisan belum berjalan sebagaimana mestinya.⁴

Secara keseluruhan rasio antara sekolah, jumlah siswa dan guru pendamping khusus di nasional pada 34 Provinsi pada SLP di Indonesia dapat dilihat pada table berikut :⁵

3 Ade Nasihudin Al Ansori *heconversation.com, Liputan6.com, (Jakarta, 02 November 2020)*

4 Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta 2019 *Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif di Indonesia Tahun 2019-2024*

5 Wahyudi dan Ratna Kristiawat, *GAMBARAN SEKOLAH INKLUSIF KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JAKARTA, 2016* (Jakarta, 2016).

Tabel : 1.1 Jumlah Siswa Inklusif dan Guru Pendamping Khusus dengan sampel pada 34 Provinsi terpadat pada SMP Inklusif di Indonesia

No	Provinsi	Sekolah	Siswa Inklusif	GPK
1	DKI Jakarta	111	551	22
2	Jawa Barat	496	2.383	158
3	Banten	130	1.214	27
4	Jawa Tengah	373	1.950	96
5	DI Yogyakarta	98	388	16
6	Jawa Timur	478	3.241	237
7	Aceh	114	250	13
8	Sumatera Utara	206	727	26
9	Sumatera Barat	75	296	4
10	Riau	82	445	49
11	Kepulauan Riau	30	92	6
12	Jambi	53	100	3
13	Sumatera Selatan	92	265	1
14	Bangka Belitung	23	91	1
15	Bengkulu	30	125	11
16	Lampung	120	663	14
17	Kalimantan Barat	78	289	7
18	Kalimantan Tengah	71	259	19
19	Kalimantan Selatan	58	592	20
20	Kalimantan Timur	54	133	7
21	Kalimantan Utara	16	34	3
22	Sulawesi Utara	70	246	21
23	Gorontalo	28	181	4
24	Sulawesi Tengah	75	491	22
25	Sulawesi Selatan	171	1.321	26
26	Sulawesi Barat	36	325	8
27	Sulawesi Tenggara	73	709	41
28	Maluku	68	527	22
29	Maluku Utara	44	553	13
30	Bali	58	149	13
31	Nusa Tenggara Barat	78	388	16
32	Nusa Tenggara Timur	226	2.716	90
33	Papua	71	2.997	67
34	Papua Barat	31	294	18
Jumlah		3.817	24.985	1.101

Sumber : DP2KLIK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
 Pada Tabel 1.1, tersebut menggambarkan bahwa jumlah sekolah, siswa ABK pada sekolah menengah pertama (SMP) inklusif di seluruh Indonesia tidak sebanding dengan jumlah guru pendamping khususnya.

Tabel : 1.2 Jumlah Siswa Inklusif dan Guru Pendamping Khusus pada SMP Inklusif Di Prov Jawa Barat

No	Propinsi	Jumlah Sekolah	Siswa ABK	GBK
	Jawa Barat	296	2.383	158

Sumber : Pokja Inklusi Jawa Barat

Pada Tabel 1.2, tersebut menggambarkan bahwa jumlah sekolah, siswa ABK pada sekolah menengah pertama (SMP) inklusif di Jawa Barat tidak sebanding dengan jumlah guru pendamping khususnya. Tabel Kondisi tersebut dapat mengakibatkan banyak siswa inklusif yang tidak mendapat pelayanan pendampingan dari GPK, karena satu GPK tidak akan mampu mendampingi 265 siswa dalam kurun waktu satu minggu dengan lokasi yang tersebar. Padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif pasal 10

menyatakan setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif wajib menyediakan minimal 1 (satu)

Implementasi mengenai pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 yaitu tentang pemberian kesempatan atau peluang khusus kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan di sekolah reguler (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dan Madrasah).⁶ Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah yang menyebutkan bahwa madrasah wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Sekolah inilah yang sering disebut sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Mengingat pentingnya sekolah tersebut maka

⁶ Tim Sub Direktorat Pendidikan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, "Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus" (2016): 6–7.

penyelenggaraan program pendidikan inklusif disekolah formal dipandang tepat untuk memberikan layanan kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus sehingga mereka dapat memperoleh pendidikan yang wajar, bermutu, dan berkelanjutan sebagaimana anak normal pada umumnya.⁷

Sejalan dengan itu Pemerintah Propinsi Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur No 5 Tahun 2017 pasal 15 dan 16 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.⁸ Peraturan Pemerintah Kota Bandung melalui Peraturan Walikota Kota Bandung No. 420 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Bandung menyatakan bahwa Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan nasional yang menyertakan semua anak secara bersama-sama dalam suatu iklim dan proses pembelajaran dengan layanan pendidikan yang layak dan sesuai dengan potensi, kemampuan, kondisi dan kebutuhan individu peserta didik tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial, ekonomi, politik, suku, bangsa dan agama, serta perbedaan kondisi fisik maupun mental. Tercermin dalam peraturan tersebut, Pemerintah Kota Bandung sangat serius dalam menjalankan amanat undang-undang sebagai bentuk layanan kepada setiap warga negara. Kesungguhan itu, tercermin dalam hal pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Bandung telah menunjuk berbagai sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi yang dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kota Bandung mengenai beberapa sekolah yang menjadi penyelenggara pendidikan inklusif.⁹

7 Suryadharma Ali, "Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013," 2013, <https://dki.kemenag.go.id/media/laws/3-191031104059-5dba57cb07927.pdf>.

8 Pemerintah Provinsi Jawa Barat, "Perda Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan," 2017.

9 J. Oliver, 'Peraturan Walikota Bandung Nomor 420 Tahun 2016', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99.

Tabel 1.3 Sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif.

No	Sekolah SMP/MTs	Alamat
1	SMPN 47	Jl. Budi Cilember No. 19 B
2	SMP Mutiara Bunda	Jl. Padang Golf No. 11. Arcamanik
3	SMP Al-Ghifari	Jl. Cisarenten No. 140
4	SMP AL-Biruni	Jl. AP. Petarani Ruko Diamond Panyileukan
5	SMP Cendekia Muda	Jl. Puri Ayu Pratama Arcamanik
6	MP Alfa Centaury	Jl. Palasari No. 9
7	SMP Hikmah Teladan	Jl. Raya Cilember No. 296
8	SMP Nugraha	Jl. PLN Dalam No. 46 Cigereleng M. Toha
9	SMP Budi istri	Jl. Sancang No. 4 Buahbatu
10	SMP Muhammadiyah 8	Jl. Kadipaten Raya No. 4 6 Antapani
11	SMP Dewi Sartika	Jl. Kautamanan Isteri No. 12
12	SMP BPI	Jl. Burangrang No. 8

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bandung

Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Kota Bandung yang selanjutnya disebut MTs MHa Informatika merupakan salah satu Madrasah Tsanawiyah di Kota Bandung yang dalam penyelenggaraannya menerima peserta didik yang memiliki hambatan spesifik baik hambatan fisik, emosional, sosial dan intelektual. MTsMHa dipandang mampu serta mempunyai identitas tersendiri yang berbeda dengan madrasah lainnya yang ada di Kota Bandung, terutama dalam kurikulumnya memasukan pendidikan keterampilan dalam bidang informatika bagi peserta didiknya. Dalam proses pembelajaran, anak berkebutuhan khusus memiliki karakter dan modalitas berbeda dengan peserta didik normal. Atas kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat dengan bertambahnya peserta didik berkebutuhan khusus, kemudian direspon oleh penyelenggara dalam hal ini yayasan,dengan melakukan pembenahan manajemen

madrasah, memulai meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan membentuk sebuah unit pelayanan psikologi (UPP).

Pendekatan, metode, teknik, dan taktik pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan belajar agar bermakna sesuai dengan anak berkebutuhan khusus (ABK). Untuk menunjang kemampuan vokasional anak, dalam hal ini vokasi yang dimaksud adalah kecakapan hidup *life skill* dalam pengertiannya mengacu pada berbagai ragam kemampuan yang diperlukan seseorang untuk menempuh kehidupan dengan sukses, bahagia dan secara bermartabat.¹⁰ Konsep kecakapan hidup yang di rekomendasikan UNESCO (2016) dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.4 Empat Pilar Pendidikan Sepanjang Hayat

Kosep	Tujuan
Belajar mengetahui (<i>learning to know</i>)	Orientasi pembelajaran pada pengetahuan logis dan rasional. sehingga peserta didik berani mengatakan pendapat dan bersikap kritis serta memiliki semangat belajar yang tinggi.
Belajar berbuat (<i>learning to do</i>)	Kecakapan setiap peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Tujuan pembelajaran diarahkan pada pengembangan kemampuan memecahkan problem.

10 Mega Iswari PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Anak berkebutuhan Khusus

<p>Belajar menjadi seseorang (<i>learning to be</i>)</p>	<p>Pembelajaran diorientasikan pada pengembangan peserta didik menjadi pribadi yang mandiri, memiliki harga diri. Pembelajaran yang diberikan hendaknya mampu memberikan motivasi untuk mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan di lingkungannya</p>
<p>Belajar hidup bersama (<i>learning to live together</i>)</p>	<p>pembentukan kesadaran kepada setiap peserta didik, bahwa dirinya berada pada dunia global yang memiliki berbagai bahasa dan latar belakang etnik, agama dan budaya yang beragam.</p>

Sumber : DPPKLIK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Menurut Terry yang disebut dengan menjemen adalah sebuah proses yang menyertakan pada pengarahan kelompok menuju kepada arah yang sudah di tentukan oleh sebuah organisasi yang nyata. Menejemen adalah sebuah ilmu atau seni. Diartikan seni karena merupakan suatu pengetahuan bagaimana cara untuk bisa mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, yang memerlukan kecakapan yang diperoleh dari pengalaman dan atau dengan kata lain seni merupakan kecakapan yang diperoleh dari pengalaman pengalaman dan pelajaran serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan menejemen.¹¹ Menurut Juran, Manajemen mutu strategis (strategic quality manajemen) adalah sebuah proses tiga bagian yang didasarkan pada staf pada tingkat yang berbeda yang memberikan kontribusi unik terhadap peningkatan mutu. Manajer senior memiliki pandangan strategis tentang organisasi

11 Perspektif Josep M Juran, 'Manajemen Mutu Madrasah Berbasis Kearifan Lokal . (2020).

manajer menengah memiliki pandangan operasional tentang mutu dan karyawan memiliki tanggung jawab terhadap kontrol mutu¹²

Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Informatika (MTsMH) sebagai penyelenggara pendidikan inklusi berbasis vokasi berupaya dalam meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan dan Standar Kompetensi Lulusannya (SKL) secara berkelanjutan dalam perspektif pada trilogy Josep M. Juran yaitu: 1. Perencanaan Mutu 2. Kendali Mutu 3. Peningkatan Mutu



Gambar1.1 Trilogi Kualitas (*The Quality Trilogy*) Sumber : Total Quality Managemen in Education

1. Perencanaan Kualitas (*quality planning*)

Proses *Quality planning* yang mengidentifikasi pelanggan dan proses yang akan menyampaikan produk dan jasa dengan karakteristik yang tepat dan kemudian mentransfer pengetahuan ini ke seluruh kaki tangan perusahaan guna memuaskan pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan/konsumen, tentukan market segment (segmen pasar) produk, mengembangkan karakteristik produk sesuai dengan permintaan konsumen mengembangkan proses yang mendukung tercapainya karakteristik produk.

2. Pengendalian Kualitas (*quality control*)

Proses *Quality control* dimana produk benar-benar diperiksa dan dievaluasi, dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan para pelanggan.

12 Edward Salis, Total Quality Management in Education (Jogjakarta: IRCiSoD, 2012), 107-108

Persoalan yang telah diketahui kemudian dipecahkan, misalnya mesin-mesin rusaksegera diperbaiki. Mengevaluasi performa produk, membandingkan antara performa aktual dan target, melakukan tindakan jika terdapat perbedaan/penyimpangan.

3. Perbaikan Kualitas (*quality improvement*)

Proses *Quality improvement* dimana mekanisme yang sudah mapan dipertahankan sehingga mutu dapat dicapai berkelanjutan. Hal ini meliputi alokasi sumber-sumber, menugaskan orang-orang untuk menyelesaikan proyek mutu, melatih para karyawan yang terlibat dalam proyek mutu dan pada umumnya menetapkan suatu struktur permanen untuk mengejar mutu dan mempertahankan apa yang telah dicapai sebelumnya. mengidentifikasi proyek perbaikan (*improvement*). Membangun infrastruktur yang memadai, membentuk tim, melakukan pelatihan-pelatihan yang relevan diagnosa sebab-akibat, cara penanggulangan masalah, mencapai target sasaran.

Dari pemaparan diatas tersebut berdampak pada munculnya berbagai permasalahan terhadap manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusi di madrasah tersebut. Permasalahan yang muncul antara lain : (1) Kesiapan manajerial dalam perencanaan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi (2) Kesiapan manajerial dalam rekrutmen tenaga pendidik bagi program pendidikan inklusif (3) Kejasama dengan pihak terkait yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif misal dengan (dokter, puskesmas, psikolog), dan (4) Sarana prasarana bagi siswa berkebutuhan khusus (5) Perencanaan rekrutmen peserta didik berkebutuhan khusus di madrasah tersebut.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Fitria Dewi Puji Lestari dan Sujarwanto (2017); penelitian ini merekomendasikan untu memperbaiki yang beraitan dengan manajemen peserta didik terkait dengan pelaksanaan assesmen

sebaiknya sekolah melibatkan pihak-pihak lain seperti psikolog atau dokter agar hasil asesmen dapat dipertanggung jawabkan.¹³

Penelitian yang dilakukan Mardan Umar, Feiby Ismail. Merekomendasikan agar segera dilakukannya upaya untuk meningkatkan mutu manajemen pendidikan inklusi di madrasah melalui pembenahan mulai dari perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan peningkatan mutu. Dengan meninjau kembali kurikulum, materi, model pembelajaran, kompetensi kepala sekolah dan guru, serta terpenuhinya sarana dan prasarana sekolah.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Manajemen Program Pendidikan Inklusi Berbasis Vokasional Dalam

Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Informatika Miftahul Huda Penelitian yang akan dilakukan didasari pada ketertarikan peneliti pada: manajemen mutu pendidikan, sistem pengajaran yang berbeda dengan madrasah lain karena menerapkan pendidikan inklusi berbasis vokasi serta berbagai permasalahan yang ada di madrasah tersebut dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan temuan masalah di atas, masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana manajemen pendidikan program inklusi berbasis vokasional dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah informatika. Rumusan masalah penelitian tentang bagaimana manajemen pendidikan inklusi

13 Fitria Dewi Puji Lestari and Sujarwanto, “Manajemen Pendidikan Inklusif Di Sekolah Menengah Pertama [Management of Inclusive Education in Junior High Schools],” *Jurnal Pendidikan Khusus* 9, no. 4 (2017): 1–13.

14 Iain Manado, Mardan Umar, and Feiby Ismail, “Jurnal Pendidikan Islam Iqra’ Vol. 11 Nomor 2 Tahun 2017 Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan [FTIK] IAIN Manado” 11 (2017).

diterapkan di lokasi penelitian akan di kupas melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pendidikan inklusi berbasis vokasi di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Bandung?
2. Bagaimana standar oprasional prosedur pendidikan inklusi berbasis vokasi di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda Bandung?
3. Bagaimana kendali mutu dipraktekan pada pelaksanaan program inklusi berbasis vokasi di MadrasahTsanawiyah Miftahul Huda Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian Secara Umum

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini di fokuskan untuk mengetahui bagaimana manajemen perencanaan, manajemen standar oprasional prosedur diterapkan, dan bagaimana manajemen kendali mutu pendidikan inklusi berbasis vokasi di MTs Informatika Miftahul Huda Bandung.

2. Tujuan Penelitian Secara Khusus

- a. Menganalisis manajemen perencanaan pendidikan inklusi berbasis vokasi di MTs Informatika Miftahul Huda Bandung.
- b. Mengidentifikasi manajemen kendali mutu pendidikan inklusi berbasis vokasi di MTs Informatika Miftahul Huda Bandung.
- c. Mengidentifikasi manajemen peningkatan mutu pendidikan inklusi di MTs Informatika Miftahul Huda Bandung.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1) Kegunaan Teoritis

Yaitu menambah khazanah teori dan praktik ilmu Manajemen Pendidikan Islam dalam pengembangan manajemen pendidikan inklusi berbasis vokasi.

2) Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai pertimbangan untuk meningkatkan mutu manajemen pendidikan inklusi di madrasah khususnya di kota Bandung.

b. Bagi Pemangku Kebijakan

Mengembangkan perannya dalam merencanakan mutu pendidikan, pengendalian mutu pendidikan dan meningkatkan manajemen mutu pendidikan inklusi berbasis vokasi agar mampu memberikan kualitas pendidikan yang terbaik di MTs Informatika Miftahul Huda Bandung.

c. Bagi Peneliti lainnya

Menambah wawasan, dan ilmu pengetahuan dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai manajemen pendidikan inklusi berbasis vokasi yang dapat menjadikan peneliti berikutnya lebih aktif, interaktif serta sebagai evaluasi bagi penyelenggara pendidikan inklusi berbasis vokasi..

D. Kerangka Pemikiran

Model pendidikan khusus bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Indonesia akhir-akhir ini cenderung mengalami perkembangan mengarah pada perubahan sistem yang telah ada sesuai dengan paradigma jenis kekhususan. Para ilmuwan yang bergerak dalam pendidikan khusus menghendaki agar pendidikan para penyandang kelainan tidak dilakukan secara khusus (*segregated*), tetapi secara terpadu (*mainstreaming*) dengan pendidikan umum.¹⁵

Istilah lain dari manajemen adalah Tata Usaha, administrasi, tadbir tata kelola, tatalaksanaan, pengelolaan, penyelenggaraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pengelolaan mempunyai 4 pengertian, yaitu: pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola; pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi; pengelolaan adalah proses

¹⁵ Sukadari, *Model Pendidikan Inklusi Dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus*, 2019.

yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.¹⁶ Pengelolaan adalah substantif dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) merupakan suatu cara atau proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan.

Manajemen berasal dari kata "*to manage*" yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola. Banyak definisi yang telah diberikan oleh para ahli terhadap istilah manajemen ini. Namun dari sekian banyak definisi tersebut ada satu yang kiranya dapat dijadikan pegangan dalam memahami manajemen tersebut, yaitu: Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian/ pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya. Artinya dalam manajemen terandung nilai nilai kepemimpinan dalam mengarahkan, mempengaruhi, mengawasi dan mengorganisasikan secara keseluruhan komponen komponen penunjang untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan (*goal*).¹⁷ secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan dan tepat waktu, Efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar dari sisi anggaran, terorganisir dan sesuai dengan jadwal.

Menurut para ahli manajemen berhubungan dengan pencapaian sesuatu tujuan yang dilakukan dengan adanya keterlibatan orang lain (*Management involves getting*

16 <https://typoonline.com/kbb>

17 Beni Ahmad Saebani dan Koko Komaruddi, *Filsafat Manajemen Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia), 17-18.

things done thought and with people). Menurut para ahli lain manajemen adalah suatu proses pengelompokan atas; perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (*Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, utilizing in each both science and art, and followed in order to accomplish predetermined objectives*).¹⁸

Dalam setiap kegiatan termasuk didalamnya berkegiatan dalam pengelolaan pendidikan diperlukan adanya pengaturan dalam pengelolaannya seperti halnya dijelaskan dalam al Qur'an surah as Sajdah Ayat 5 telah menjelaskan:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَّٰهِي ۖ إِلَّا أَرْضًا ثُمَّ يُعْرِجُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَسَبِّحْهُ ۗ قَدْ خَلَقْنَا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَبَيْنَهُنَّ الْأَرْضَ وَإِلَّا تُبْصَرُونَ (سجدة: 5 : 32 هـ) الْفَتْ سَنَةً مَّا تَعُدُّواُونَ (السجدة:

Artinya: "Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu".(Q.S. as Sajdah[22]:5).

Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah swt adalah pengatur alam (Al Mudabbir/manager). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah swt dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah Swt telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus

mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.¹⁹

Di dalam ayat yang lain Allah memberikan arahan kepada setiap orang yang beriman untuk mendesain sebuah rencana apa yang akan dilakukan di kemudian hari sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al Hasyr :59 : 18 yang berbunyi :

18 Pengembangan Madrasah Dan, *No Title*, n.d.

19 Achyar Zein, *Ayat-Ayat Alqur'an tentang Manajemen Pendidikan*

هَالِلٌ أَنْ هَالِلٌ وَالتَّانِظُ ارْنَا فَسْ مَا قَدَمَّ ات لَّعِي وَانْقُوا يَايَةَ اَلَّذِ اَيْنَ اَمْنُوا اتَّقُوا
هَالِلٌ حَبِّ اِيْرِبَّمَا ت اَعْمَل اُوْن
(59:18) الحشر:

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. al Hasyr [59] : 18)

Pendidikan inklusif (ketika dipraktikkan dengan baik) sangat penting karena:

- 1) Anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi menjadi bagian dari komunitas sekolah, setiap anak akan mengembangkan potensi dirinya sehingga akan lebih siap hidup dalam komunitasnya.
- 2) Memberikan peluang lebih baik untuk dapat belajar karena termotifasi dengan anak-anak lain di sekelilingnya.
- 3) Dengan pendidikan inklusi, setiap anak akan memiliki harapan lebih tinggi
- 4) Pendidikan inklusi memungkinkan anak-anak untuk mengerjakan tujuan individu sambil bersama siswa lain
- 5) Pendidikan inklusi mendorong keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak
- 6) Pendidikan inklusi memberi peluang lebih baik untuk menumbuhkan budaya hormat menghormati dan toleransi atas perbedaan yang dimiliki setiap individu.
- 7) Pendidikan inklusi memberikan peluang lebih besar untuk berinteraksi dalam keteladanan bersama teman untuk tumbuh dilingkungan sekolah.²⁰ Untuk menuju apa yang diuraikan di atas, peneliti menyusun kerangka berpikir dengan model Dr.

20 Suyadi & Maulidya Ulfa, “Pendidikan Yang Inklusif Dan Menyenangkan,”
Diseminasi Hasil Pelatihan Luar Negeri Bidang Pendidikan Dasar Program Bermutu DIKTI
(2012): 1–11.

Joseph M. Juran (1954)²¹ sebagai panduan untuk menemukan solusi dalam penelitian ini disajikan bagan sebagai berikut :

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini telah menginspirasi penulis untuk melanjutkan penelitian serupa dengan tema yang berbeda, adapu hasil penelitian terdahulu yang dikutip adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Fitria Dewi Puji Lestari dan Sujarwanto

Fitria Dewi Puji Lestari dan Sujarwanto (2017), Manajemen Pendidikan Inklusif Di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Sidoarjo.

Peneitian ini menggunakan metoda penelitian kualitatif dalam peningkatkan mutu pendidikan,sekolah inklusif yang meliputi aspek Manajemen peserta didik yang diawali dengan adanya perencanaan penerimaan peserta didik baru melalui kegiatan analisis kebutuhan peserta didik. Adapun perencanaan dalam kegiatan analisis kebutuhan peserta didik diantaranya, sekolah merencanakan jumlah peserta didik baru dengan mempertimbangkan jumlah kelas yang tersedia, merencanakan program kegiatan kesiswaan serta pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru .Peneliti menyarankan kepada Kepala Sekolah dala penerimaan peserta didik ABK untuk melibatkan psikologh, mengadakan studi bandi bagi guru pendamping khusus,bekerjasama dengan lembaga terkait.Untuk GPK membangun kerja sama dengan orang tua dan guru kelas dan walikelas,Mendata dan memberikan laporan perkembangan anak.²²

21 Manajemen Mutu, Terpadu Total, and Quality Management, “Manajemen Mutu Terpadu” (n.d.): 107–115.

22 Lestari and Sujarwanto, “Manajemen Pendidikan Inklusif Di Sekolah Menengah Pertama [Management of Inclusive Education in Junior High Schools].”

2. Penelitian Eri Wati

Ery Wati (2014)²³ Melakukan penelitian dengan judul;Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program pendidikan inklusi, implementasi manajemen pendidikan inklusi dan kendala yang dihadapi dalam implementasi manajemen pendidikan inklusi di SD Negeri 32 Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara dan dokumentasi. Subyek penelitian. adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru pendamping khusus dan orang tua murid alumni.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Program kepala sekolah dalam melaksanakan pendidikan inklusi diimplementasikan dalam pemberian pelatihan kepada guru-guru, penerimaan peserta didik ABK, memodifikasikan kurikulum serta mengupayakan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 2) Implementasi dari manajemen pendidikan inklusi dapat dilihat dari jumlah siswa berkebutuhan khusus pada tahun ajaran 2009/2010 berjumlah 19 orang, mempunyai 1 (satu) tenaga guru pendamping khusus, serta kurikulum yang sudah dimodifikasi menurut kebutuhan peserta didik. 3) Kendala dari program pendidikan inklusi adalah pembiayaan pendidikan, sarana dan prasarana belum memadai serta kurangnya tenaga guru pendamping khusus.

Pada penelitian terdahulu membahas tentang manajemen pendidikan secara umum. Sebagai pembeda dengan penelitian ini membahas manajemen pendidikan inklusi yang berbasis vokasi.

23 Ery Wati, Jurnal Imiah : Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh , *Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran*, 14.2 (2014) [accessed 30 June 2020].

2. Penelitian Sumarni

Sumarni melakukan penelitian Management Of, Inclusive Education, and I N Madrasa,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pendidikan inklusif di MTs Yabika Tangerang Banten khususnya terkait pengelolaan peserta didik, sarana prasarana, tenaga pendidik, kurikulum dan penilaian, pembiayaan, pembinaan, dan monitoring dan evaluasi serta hubungannya dengan masyarakat.

Metoda penelitian pendekatan kualitatif. Informan penelitian adalah pengurus yayasan, Kepala dan wakil kepala MTs Yabika, Kepala MA Yabika, guru, dan Kepala Tata Usaha. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif.²⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan inklusif di MTs yang merupakan madrasah inklusif ditunjuk sebagai pilot project madrasah secara umum sudah berjalan amun memiliki beberapa catatan diantaranya: Manajemen Peserta didika (rekrutmen), Kopetensi guru, belum adayna pengawasan dan sistim evaluasi.

3. Heni Mularsih

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif survei dengan partisipan guru atau kepala sekolah.

Pengumpulan data dengan purposive sampling, Instrumen berupa kuesioner tertutup dan terbuka untuk memperoleh jawaban bebas dari partisipan. Penelitian dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Inklusi di Jakarta Barat secara umum belum memenuhi persyaratan dari setiap komponen penyelenggaraan Pendidikan inklusi yang diatur dalam Permendiknas (2007). Secara dominan komponen (1) peserta didik, sekolah tidak melakukan penjaringan ABK karena hanya menerima hasil pendaftaran secara online dan tidak melakukan identifikasi ABK, (2) pendidik, sekolah tidak memiliki guru khusus atau guru umum yang terlatih, serta guru tidak membuat program pembelajaran individual, (3) kurikulum, sekolah secara umum

masih menerapkan kurikulum reguler (60%) dan kurikulum PPI hanya (16%), (4) sarana dan prasarana, sekolah tidak menyediakan fasilitas untuk ABK (78%), dan hanya menyediakan fasilitas minimal (18%), (5) usaha yang dilakukan guru baru sebatas memanggil orang tua siswa berkebutuhan khusus untuk konsultasi, dan (6) program kegiatan, sekolah baru melakukan pemanggilan dan sosialisasi pada orang tua, dan beberapa sekolah baru mengirim guru untuk pelatihan secara minimal (22%). Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar negeri di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan partisipan guru atau kepala sekolah. Yang menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di SD di Jakarta Barat secara umum belum dilakukan secara baik..²⁵

F. Definisi Operasional

1. Manajemen mutu

Manajemen mutu yang dikenal *total management quality* atau TQM dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang membantu sebuah organisasi, perusahaan, atau badan usaha untuk mengawasi setiap kegiatan serta tugas dan tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan kualitas atau mutu dari perusahaan tersebut. *Total management quality* sendiri merupakan sebuah sistem yang menentukan kebijakan, merencanakan, mengontrol, dan mengembangkan kualitas mutu yang diberikan perusahaan. Sistem ini juga dikenal sebagai sebuah filosofi dasar yang menyatakan bahwa kepuasan pelanggan akan menentukan keberhasilan jangka panjang dari sebuah badan usaha. Di dalamnya, semua stakeholders atau pemangku kepentingan bekerjasama dalam peningkatan kualitas produk dan layanan serta budaya kerja di lingkungan perusahaan.²⁴

Selain itu, ada definisi lain yang menjelaskan bahwa sistem manajemen dalam menjaga mutu adalah sebuah sistem manajemen yang lebih mengedepankan kualitas

24 Mutu, Total, and Management, "Manajemen Mutu Terpadu."

sebagai strategi bisnis yang berorientasi pada kepuasan pelanggan yang melibatkan seluruh SDM di lembaga pendidikan tersebut

2. Manfaat Manajemen Mutu

Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dari proses manajemen mutu jika diterapkan di dalam dunia Pendidikan, antara lain:

- a. Memberikan kepuasan kepada para pelanggan, peserta didik, orang tua, masyarakat pengguna, sehingga menjaga kepercayaan terhadap sekolah/madrasah.
- b. Menumbuhkan rasa motivasi di dalam diri para pelaksana proses pembelajaran
- c. Meningkatkan standar kerja di tenaga pendidik dan kependidikan.
- d. Meningkatkan dan menjaga nama baik lembaga Pendidikan.

3. Fungsi Manajemen Mutu

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, manajemen mutu memiliki fungsi sebagai sebuah acuan atau tolak ukur dalam mengelola kualitas yang diberikan oleh suatu perusahaan, organisasi lembaga pendidikan maupun badan usaha. Hal ini akan sangat mempengaruhi kualitas dan kinerja seluruh anggota perusahaan dalam

menjalankan tugasnya masing-masing guna mencapai tujuan dan visi dari lembaga organisasi tersebut.²⁵

4. Proses Manajemen Mutu

Tahapan di dalam manajemen mutu, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan yaitu :

Pertama Perencanaan dan Strategi Mutu : Untuk mencapai suatu tujuan, diperlukan proses perencanaan dan strategi yang matang agar keputusan-keputusan yang diambil dapat lebih terarah dan sesuai. Hal ini juga berlaku di dalam dunia bisnis. Untuk melaksanakan, harus diawali dengan perencanaan yang baik. rencana

²⁵ Manajemen Peningkatan et al., "Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan," *TADBIR : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan* 1, no. 2 (December 18, 2017): 2, accessed June 2, 2021, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JSMP/1/article/view/295>.

dan strategi yang dibuat pun juga harus memiliki struktur tahapan atau proses yang tepat. Hal ini dilakukan agar kualitas mutu yang diinginkan dapat tercapai dan memenuhi standar yang berlaku.

Selain itu, di dalam tahap perencanaan strategi ini juga perlu dilakukan analisis untuk mengetahui kebutuhan dari konsumen atau pelanggan agar membantu meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk maupun jasa yang dihasilkan. Kedua Implementasi Perencanaan Mutu : Setelah melakukan perencanaan strategi yang matang, implementasi mutu diperlukan untuk mengaplikasikan hasil rancangan yang sudah dibuat. Di dalam proses implementasi mutu, ada hal yang perlu diperhatikan, seperti standar pengerjaan atau pembuatan produk, dan pengecekan kualitas mutu. Jika sudah sesuai dengan standar mutu yang digunakan oleh perusahaan, barulah produk maupun hasil akan diberikan dan disebarluaskan kepada para konsumen di luar. Ketiga Evaluasi Mutu : Setelah mengimplementasikan produk dan menyebarluaskan produk kepada para konsumen, maka tahap berikutnya yang perlu dilakukan adalah proses evaluasi mutu. Proses evaluasi mutu berguna untuk meninjau kembali hasil dari produk yang dikeluarkan. Di dalam proses evaluasi ini,

perusahaan perlu untuk memeriksa kembali tingkat kepuasan serta respon yang didapatkan dari produk yang sudah dihasilkan. Nantinya, hasil review atau evaluasi ini akan berguna dalam perbaikan atau pengembangan produk lebih lanjut. Keempat Perbaikan atau Pengembangan. Setelah mengevaluasi hasil dan kualitas dari produk yang sudah dikeluarkan sebelumnya, sebuah perusahaan perlu melakukan langkah terakhir dan yang paling krusial, yaitu pengembangan atau perbaikan. Proses ini merupakan proses lanjutan yang memanfaatkan hasil pemantauan dan pengendalian mutu hingga sebuah perusahaan dapat berinovasi lebih lanjut terhadap produk atau jasa yang sudah dikeluarkan sebelumnya.

Pada dasarnya, hasil dari proses maupun tahapan awal harus ditinjau kembali untuk menyempurnakan dan mengembangkan kualitas mutu dari perusahaan. Ini merupakan salah satu tujuan awal yang diinginkan dalam mengimplementasikan

manajemen untuk menjaga mutu. Di dalam tahapan perbaikan atau pengembangan ini, ada 3 aspek yang harus ditargetkan, yaitu kinerja atau implementasi mutu terhadap produk, manajemen atau pengelolaan mutu, dan manajemen atau pengelolaan badan usaha atau perusahaan itu sendiri secara keseluruhan. Itulah beberapa penjelasan mengenai apa itu manajemen mutu.²⁶

5. Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif dapat didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi siswa normal maupun siswa difabel untuk mengikuti proses pembelajaran dalam satu lingkungan yang sama. Sistem tersebut memungkinkan siswa difabel yang tidak mengalami disabilitas intelektual untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan sekolah reguler, bukan SLB.²⁷

Kecenderungan inklusivitas ini diharapkan mampu mengatasi kesenjangan pendidikan bagi siswa difabel karena anak-anak berkebutuhan khusus juga memiliki potensi serta kecerdasan yang patut dikembangkan. Sayangnya, hingga saat ini belum banyak sekolah yang menerapkan sistem inklusi dan bersedia menerima siswa difabel dengan tangan terbuka. Kehadiran siswa difabel dikhawatirkan mengganggu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) karena sulit menerima dan mencerna materi pelajaran yang diberikan pendidik. Padahal pengalaman KBM yang melibatkan siswa normal dan siswa difabel mampu memberikan banyak manfaat yang tidak bisa diperoleh dalam sistem pendidikan biasa.²⁸

Berdasarkan pemaparan dari berbagai pendapat dapat disimpulkan bahwa pendidikan vokasional adalah proses pembelajaran yang dilakukan agar peserta didik mampu mengembangkan dan mengeksplorasi seluruh potensi yang ada sehingga peserta didik siap untuk bekerja dengan kompetensi yang dimiliki sesuai bidangnya.

26 Deni Sutisna and Universitas Mataram, "Implementasi Manajemen Mutu Di Sdn Prabon" (n.d.).

27 Sukadari, *Model Pendidikan Inklusi Dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus*.

28 H Amka, *Manajemen Sarana Sekolah Penyelenggara Inklusi*, 2020.

Pendidikan di perguruan tinggi dengan status tinggi seperti pendidikan dokter, pendidikan notaris, pendidikan bisnis, teknik dan sebagainya termasuk dalam cakupan 13 pendidikan vokasional sebagai pendidikan untuk okupasi. Semua pendidikan yang diselenggarakan di perguruan tinggi jika mengorientasikan lulusannya untuk bekerja maka termasuk dalam cakupan bidang pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional pada level SMP/ Madrasah dengan status rendah vokasional baru dipahami sebagai pendidikan yang diselenggarakan di Madrasah masih sebatas motivasi terhadap keretampilan yang diinginkan peserta didik. Perspektif ini tentu belum sesuai dengan hakikat dari pendidikan vokasional sebagai pendidikan untuk okupasi (Sudira, 2015:6).²⁹ Pendidikan vokasi memiliki karakteristik pendidikan yang mampu menggabungkan fungsi pendidikan dan pelatihan. Pendidikan vokasional memiliki peluang untuk mengembangkan “manusia seutuhnya” dengan landasan teoritis dan basis akademik yang mencukupi, dan pada saat bersamaan mengembangkan kemampuan (kompetensi) bekerja sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.³⁰

Melihat latar belakang penyiapan SDM yang masih perlu ditingkatkan, maka memilih pendidikan *vokasional* untuk dijadikan model sekaligus lokomotif pengembangan SDM bangsa Indonesia, dengan kemampuankompetitif dan penguasaan kompetensi yang memadai, adalah kebijakan yang tepat. Kondisi ini menuntut pendidikan vokasional perlu melakukan pengembangan secara terus menerus dan diperlukan pula upaya yang sistematis, yang didukung oleh kebijakan pengembangan pendidikan tinggi secara nasional, dan berkelanjutan secara institusional untuk mengembangkan pendidikan *vokasional*

29 Ishartiwi, “Pembelajaran Keterampilan Untuk Pemberdayaan Kemandirian Anak Berkebutuhan Khusus,” *Majalah Ilmiah Dinamika Pendidikan* (2010): 23–26.

30 Anak and Khusus, *PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS*.